

AKUNTANSI KEUANGAN MESJID: SUATU TINJAUAN

Liesma Maywarni Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
liesmamsiregar@gmail.com

Abstrak

Masjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan bernuansa keIslaman membutuhkan dana dalam pengelolaannya. Di Indonesia sangat banyak masjid yang tersebar dilurih pelosok negeri. Hal ini selaras dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Penyebaran masjid tidak hanya dikawasan perumahan tetapi juga di kawasan perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, tidak ketinggalan kampus-kampus perguruan tinggi juga memiliki masjid serta pondok pesantren dan sekolah.

Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelola masjid bertanggung jawab kepada masyuarakat dalam hal ini adalah jamaah masjid tersebut. Standar pengelolaan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid yang akurat dibutuhkan penerapan akuntansi. Peranan akuntansi dalam hal ini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan masjid.

Kata Kunci : Masjid, Organisasi Nirlaba, Akuntansi

Pendahuluan

I. Latar Belakang

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang banyak terdapat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Definisi mengenai organisasi nirlaba diungkapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2012), yaitu organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan.

Terdapat beberapa bentuk dari organisasi nirlaba atau juga dikenal dengan organisasi non profit di antaranya adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, organisasi-organisasi sukarelawan atau juga tempat ibadah seperti masjid, gereja, atau vihara. Masjid sebagai rumah atau tempat ibadah umat muslim menyebar dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini selaras dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Penyebaran masjid tidak hanya dikawasan perumahan tetapi juga di kawasan perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, tidak ketinggalan kampus-kampus perguruan tinggi juga memiliki masjid serta pondok pesantren dan sekolah.

Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan terdapat 3.946 masjid di Propinsi Sumatera Barat. Khusus untuk Kota

Padang terdapat 287 masjid yang. (<http://simas.kemenag.go.id>). Dari jumlah tersebut, mayoritas masjid dikelola secara swadaya oleh masyarakat, sebagian kecilnya dimiliki oleh kampus perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta juga memiliki memiliki mesjid yang berlokasi dalam lingkungan kampus. Di samping itu terdapat masjid yang dikelola oleh instansi pemerintah, BUMN swasta dan sekolah. Banyaknya jumlah masjid di Kota Padang sebagai salah satu organisasi nirlaba membutuhkan pelaporan keuangannya setiap periode. Pelaporan keuangan masjid akan memberikan gambaran kepada para donatur (pemerintah dan swasta), serta jamaah masjid. Ini merupakan tanggungjawab badan pengelola masjid atau pengurus masjid tersebut.

Tanggungjawab ini dalam Islam biasa dikenal dengan istilah amanah, dalam konsep barat dikenal dengan istilah akuntabilitas. Menurut Triyuwono (2009:340) Dalam Islam, manusia memperoleh amanah dari Tuhan sebagai *khalifatullah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Sebagai wakil Tuhan di bumi manusia diberi hak untuk mengeksplorasi bumi berdasarkan keinginan Tuhan. Dengan kata lain, manusia dalam mengeksplorasi bumi harus berdasarkan pada etika syariah, yang konsekuensinya kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Sebagai organisasi nirlaba, pengelolaan keuangannya haruslah mencerminkan akuntabilitas yang baik. Amanah sebagai bentuk dari akuntabilitas dalam Islam akan memberikan informasi kepada jamaah atau stakeholder lainnya. Informasi pengelolaan masjid yang diberikan kepada stakeholder haruslah yang dapat memberikan penjelasan yang baik dan benar. Hal ini tidak mudah, mengingat pengelolaan masjid khususnya pengelolaan keuangan masih bersifat sangat sederhana. Mayoritas masjid hanya menyampaikan laporan pengelolaan keuangannya melalui papan pengumuman dalam masjid yang berisikan daftar uang masuk dan daftar uang keluar. Sementara keinginan stakeholder (dalam hal ini donatur dan jamaah) mengharapkan laporan keuangan yang lebih rapi.

Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba juga mempunyai kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan. Sebagai organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Untuk itu masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid yang akurat dibutuhkan penerapan akuntansi. Peranan akuntansi dalam hal ini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan masjid.

II. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dalam penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran pentingnya akuntansi keuangan masjid sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba.

Praktik Akuntansi Keuangan untuk Organisasi Masjid

Dalam mengelola masjid dibutuhkan manajemen yang baik. Manajemen masjid itu sendiri adalah satu kesatuan sistem dalam menyelenggarakan semua aktivitas masjid menuju masjid yang fungsional sesuai dengan tuntutan syariah yang akan di pertanggung

jawabkan baik di dunia maupun di akhirat oleh pengelola masjid. Masjid memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif serta segala bentuk informasi yang dapat mendukung sarana peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid.

Salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup serta kemakmuran masjid adalah pengelolaan keuangan masjidnya harus dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena masjid memerlukan ketersediaan dana setiap bulannya dalam jumlah yang tidak sedikit, bergantung kepada besar atau kecilnya masjid serta kegiatan masjidnya. Untuk mendukung semua kegiatan yang ada seperti kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan masjid.

Bagi *stakeholder* masjid berkenaan, akuntansi dan laporan keuangan berfungsi untuk memberikan pertanggungjawaban pengurus karena akuntansi bisa menginformasikan kesinambungan hidup organisasi. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkelanjutan yang berguna sehingga memberikan gambaran apakah tujuan itu dapat dicapai atau sudah terealisasi. Menurut Zoelisty (2014) menyatakan sasaran utama laporan keuangan entitas nirlaba adalah memberikan informasi kepada penyedia sumber daya, pada periode berjalan dan pada saat yang akan datang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengambil keputusan rasional dalam pengalokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.

Pada organisasi nirlaba seperti masjid, laporan keuangannya dapat digunakan untuk:

1. Pengurus masjid memutuskan apakah akan merancang program baru tau menggeser program – program yang kurang efektif
2. Pembuatan anggaran oleh manajer
3. Penanggung jawab organisasi memutuskan apakah akan merekomendasikan penggantian pengurus atau tidak
4. Bagi *stakeholder* mengetahui apakah kinerja organisasi memadai atau tidak memadai.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba Laporan keuangan masjid/entitas nirlaba terdiri atas:

- a. Laporan posisi keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
- b. Laporan aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
- c. Laporan arus kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
- d. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

Praktik Akuntansi Manajemen untuk Organisasi Masjid

Manajemen keuangan secara umum didefinisikan sebagai pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Dengan kata lain, definisi yang lain menyatakan manajemen keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi. Dalam konteks organisasi masjid, manajemen keuangan organisasi masjid adalah usaha yang dilakukan pengelola masjid dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama serta bagaimana memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama.

Para ahli membagi manajemen keuangan masjid pada tiga bagian, seperti Ayub, Muhsin, Mardjoned (1996) terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu anggaran masjid, sumber dana masjid, dan laporan keuangan masjid. Sedangkan Lewis (2007) memberikan pengertian terkait manajemen keuangan itu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian, pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*).

Dari definisi tersebut, maka dalam manajemen keuangan masjid terdapat dua fungsi yaitu:

1. Fungsi mendapatkan dana; dan
2. Fungsi menggunakan dana

Dalam prakteknya, manajemen keuangan masjid meliputi empat aspek dalam Fitrii, 2017) yaitu:

1) Mengelola sumber daya yang langka

Organisasi nirlaba dalam hal ini manajemen masjid harus memastikan bahwa seluruh dana dan sumber daya yang didonasikan kepadanya digunakan secara tepat dan hanya demi menghasilkan manfaat serta dampak yang terbaik, untuk mencapai misi dan tujuan, yakni pelayanan kemanusiaan.

2) Mengelola risiko

Manajemen akan menghadapi risiko-risiko internal dan eksternal yang dapat mengancam kinerja bahkan eksistensinya. Risiko tersebut harus dikelola melalui suatu upaya yang terorganisasi untuk membatasi kerusakan yang bisa ditimbulkannya lebih jauh. Upaya dilakukan dengan memapankan sistem dan prosedur untuk mewujudkan kontrol keuangan.

3) Mengelola organisasi secara strategis

Manajemen masjid diharuskan dapat mengelola masjid dengan baik karena organisasinya terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang. Setiap anggota dalam manajemen masjid bisa saja juga tergabung dalam organisasi lainnya. Mekanisme dengan latar belakang yang beragam ini akan tercipta suatu manajemen yang diharapkan dapat mengelola masjid dengan baik. Adanya kerja sama dan tujuan bersama inilah yang akhirnya mendasari munculnya manajemen masjid yang dapat diandalkan..

4) Mengelola berdasarkan tujuan

Manajemen keuangan organisasi nirlaba dalam hal ini manajemen masjid membutuhkan perhatian yang intensif pada pelaksanaan proyek dan pencapaian tujuan organisasi. Karena proses manajemen keuangannya berlangsung secara simultan di dalam suatu siklus yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari istilah manajemen, maka hal ini berarti akan terkait dengan kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam manajemen keuangan lembaga akan terdapat proses penyusunan anggaran, penyelenggaraan manajemen uang kas masuk dan keluar, pemeriksaan atau audit, dan evaluasi atau analisis atas kinerja keuangan lembaga. Berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat yang dijalankan secara terencana, terukur, serta terkontrol.

Pengendalian keuangan ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unit atau orang yang bertanggung jawab dalam hal keuangan
Dalam organisasi, baik besar atau kecil, harus ada unit atau orang tertentu yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Tidak boleh terjadi setiap orang bertidak sebagai bendahara. Semua aliran dana masuk dan keluar hanya dilakukan satu pintu.
2. Adanya Anggaran
Sebagai alat pengendalian, anggaran dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau alat pembanding dalam mengevaluasi kegiatan.
3. Adanya Kebijakan
Dengan adanya kebijakan yang jelas dapat menghindarkan pengeluaran dan penggunaan dana oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.
4. Pelaporan
Sebagai sarana pengendalian keuangan pelaporan dan publikasi merupakan sarana pengendalian keuangan yang melibatkan bukan hanya atasan melainkan seluruh masyarakat.
5. Pencatatan
Pencatatan sangat diperlukan untuk setiap transaksi keuangan agar dapat dapat ditelusuri.
6. Prosedur
Proses pencatatan setiap penerimaan atau pengeluaran harus melalui prosedur untuk menghindari penerimaan atau pengeluaran yang tidak sesuai.
7. Personalia
Berjalannya suatu organisasi apabila dikelola dengan baik, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mengisi berbagai posisi. Pengelola yang amanah dan profesional merupakan unsur utama dalam pengendalian. Sebaik apapun unsur-unsur yang lain tidak akan banyak berarti tanpa pengelola yang memiliki aqidah yang lurus dan akhlak yang mulia.
8. Audit Internal
Berbagai kesalahan bisa saja terjadi, diharapkan audit internal dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan karena kelalaian maupun kesengajaan baik terkait dengan syariah maupun etika umum yang berlaku di masyarakat.

Unsur-unsur yang Harus Ada dalam Bagan Akun

Bagan akun merupakan daftar prakiraan (rekening) sistem akuntansi yang dirancang untuk mendapatkan informasi keuangan, mempertahankan jalur informasi keuangan, dan membuat keputusan keuangan. Informasi tersebut hanya dicatat dengan kode akun dari bagan akun.

Menurut Bastian (2007) Bagan tersebut dibagi ke dalam 5 kategori yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan biaya. Cara terbaik untuk merancang bagan akun atau perkiraan adalah dengan mempertimbangkan laporan apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan eksternal, pengambilan keputusan, dan penilaian pengelola. Sebagai

contoh, bagan akun harus berhubungan dengan kategori anggaran, sehingga laporan yang dihasilkan dapat membandingkan apa yang dianggarkan dengan realisasinya.

Selain jenis pendapatan dan biaya, ada juga faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam bagan akun. Jika lebih dari satu tempat, apakah informasi yang terpisah dibutuhkan untuk masing-masing tempat? Atau, jika lebih dari satu program, apakah item-item seperti persediaan, peranko, dan gaji diungkapkan untuk masing-masing program? Dan akhirnya, berdasarkan Pernyataan Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang baru No. 116 dan 117, organisasi nonprofit seperti yayasan harus melaporkan pendapatan dan belanjanya dalam tiga kategori: yaitu tidak terikat, terikat, temporer, dan terikat permanen. Ini berarti bahwa bagan akun mendukung persyaratan pelaporan.

Apabila tingkat yang lebih tinggi dibutuhkan, maka software akuntansi akan diperlukan untuk menjalankan transaksi keuangan. Software akuntansi itu sering kali membagi transaksi ke dalam beberapa bagian kecil dan kemudian menentukan tingkat rincian yang akan digunakan dalam laporan. Proses menghasilkan informasi yang sangat rinci secara manual sangat memakan waktu.

Aturan yang baik adalah membuat bagan akun sesederhana mungkin dan memperbaikinya untuk meningkatkan ketersediaan informasi secara berkesinambungan. Hal yang dituliskan dalam cek atau penerimaan uang adalah nomor akun yang ditetapkan untuk transaksi. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa bagan akun perlu direvisi. Dengan kata lain, kriteria penentuan nomor akun dijelaskan.

Ciri-ciri Bagan Akun yang Sederhana

Bagan akun yang diberikan pada akhir bagian ini menggambarkan kesesuaian item belanja dan pendapatan dengan nomor akun yang berlaku. Contoh dibawah ini merupakan pedoman tentang pengembangan bagan akun itu sendiri. Ciri-ciri dari contoh bagan akun berikut perlu diamati dengan seksama. Kategori akun disajikan dalam urutan standar dimulai dengan akun yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut.

1. Aktiva

Aktiva adalah item nyata dari suatu yayasan dimana sumber daya, termasuk kas, akun piutang, perlengkapan, dan kekayaan, diungkapkan. Aktiva biasanya dimasukkan dalam daftar menurut urutan menurun (descending) dari likuiditasnya. Hal ini berarti bahwa kas dan aktiva lainnya yang mudah diubah menjadi kas dicantumkan pada urutan awal; dan aktiva tetap seperti kekayaan dan peralatan diurutkan akhir. Akun aktiva biasanya dimulai dengan angka "1".

2. Utang

Utang adalah kewajiban ke kreditor seperti pinjaman dan utang usaha. Utang yang jatuh temponya sekarang dicantumkan lebih awal dibanding utang yang jatuh temponya dalam tahun berikutnya. Utang usaha dan utang pajak upah biasanya dicantumkan sebelum utang lainnya. Penerimaan yang ditangguhkan dan utang lainnya sering kali dicantumkan dalam urutan berikutnya pada daftar. Utang sering kali dimulai dengan angka "2".

3. Aktiva Bersih

Aktiva bersih mencantumkan nilai keuangan dari suatu yayasan. Aktiva tersebut mencerminkan saldo yang ada setelah kewajiban yayasan dilunasi. Perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk yayasan melaporkan "aktiva bersih". Sementara itu, yayasan penerima pemberian yang tidak terikat memiliki satu akun aktiva bersih.

Aktiva tetap yang terikat, baik secara permanen maupun temporer, seperti sumbangan memiliki lebih dari satu akun aktiva bersih, yang biasanya dimulai dengan angka “3”.

Organisasi nirlaba dalam hal ini masjid harus mencatat pembelian peralatan dan kekayaan yang bersifat jangka panjang, karena jenis aktiva tersebut menanggung biaya per tahun sesuai dengan umur manfaatnya. Proses ini disebut sebagai kapitalisasi dan penyusutan aktiva tetap. Pencatatan akuntansi untuk mencatat penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh lembaga sama dengan pencatatan akuntansi untuk penyusutan aktiva tetap pada umumnya.

Mencatat Akun Sumbangan

Komitmen untuk memberikan kontribusi secara tertulis bisa dijadikan dasar untuk pencatatan transaksi utang sumbangan. Sebagai contoh, seorang donatur berjanji akan memberikan sumbangan senilai Rp 1.000.000,- selama tiga tahun mendatang. Dengan menyajikan piutang hibah dalam neraca, pengelola memperlihatkan jumlah uang yang diharapkan akan diterima di masa mendatang dalam bentuk sumbangan hibah.

Piutang hibah yang bisa dipercaya sebaiknya dicatat dalam sistem akuntansi. Terdapat dua jenis piutang, yaitu piutang yang mengikat dan piutang yang tidak mengikat. Piutang yang tidak mengikat adalah piutang yang dilakukan oleh donatur untuk memberikan hibah kepada pengelola masjid di masa yang akan datang. Namun pengelola tidak perlu memenuhi beberapa persyaratan khusus sebelum menerima hibah dan tidak ada kondisi lain yang ditetapkan oleh donatur. Piutang yang mengikat adalah kesatuan peristiwa yang tidak menentu di masa mendatang. Misalnya, seorang donatur berniat untuk memberikan uang sebesar seribu rupiah jika yayasan telah memperoleh hibah yang sesuai sebesar dua ribu rupiah dari sumber lain. Sedangkan untuk piutang yang tidak dapat terkumpul, maka yayasan mencatatnya pada akun Cadangan untuk Piutang yang Tidak Terkumpul, dan akan mengurangi Piutang Hibah masjid.

Laporan Posisi Keuangan Sesuai PSAK (PSAK) Di Indonesia

Laporan keuangan organisasi nonprofit seperti yayasan meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan, (Bastian, 2007).

i. Laporan Posisi Keuangan

a. Klasifikasi aktiva dan kewajiban

Informasi mengenai likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo
2. Mengelompokkan aktiva ke dalam bagian lancar dan tidak lancar, serta kewajiban ke dalam bagian jangka pendek dan jangka panjang
3. Mengungkapkan informasi mengenai likuidasi aktiva atau saat jatuh tempo kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva pada catatan atas laporan keuangan

b. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah setiap kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat

Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer akan diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan

ii. Laporan Aktivitas

Tujuan dan Laporan aktivitas difokuskan pada yayasan secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva dalam laporan aktivitas akan tercermin pada aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan terdiri atas aktivitas sebagai berikut.

1. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih yang terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat selama suatu periode.

2. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat

Sementara itu, sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada tindakannya ada tidaknya pembatasan. Jika sumbangan terikat yang pembatasnya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurangan aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

3. Informasi Mengenai Pendapatan dan Beban

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara netto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Informasi Mengenai Pemberian Jasa

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

iii. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini:

1. Aktivitas pembiayaan

a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang

b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi.

c. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang

2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Kesimpulan

Terlaksananya sistem akuntansi pada pengelolaan masjid akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya tersedianya akuntansi dan laporan keuangan bagi *stakeholder* masjid berkenaan, berfungsi untuk memberikan pertanggungjawaban pengurus karena akuntansi

bisa menginformasikan kesinambungan hidup organisasi. Maka laporan keuangan diharapkan memberikan informasi berkelanjutan yang berguna sehingga memberikan gambaran apakah tujuan itu dapat dicapai atau sudah terealisasi.

Akuntansi keuangan masjid sesuai dengan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan

Referensi

- Ayub, M. E., Muhsin, & Mardjoned, R. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga
- Fitri, Amellia Rahma, (2017) *Memotret Praktik Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Pada Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang dan Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang)*
- Lewis, Terry. 2007. *Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Zoelisty, Adityawarman Capridiea. 2014. "*Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro)*". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3, No. 3, Tahun 2014. Semarang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- (http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/280/?keyword=Kota+Padang&provinsi_id=3)